

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karnasudirdja, H. Eddy Djunaedi, 1984, *Standar Pemidanaan*, Lokakarya, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, MRCons Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Suhrawardi K., 2002, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Jakarta.

Poerwadarminta, WJS, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Kalimantan Selatan

Santoso, Lukman, 2019 *Asas kebebasan hakim dalam penjatuan pidana: kajian komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Sahir, Syafrida Hafni, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta.

Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.

Suparni, Niniek, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Syarifuddin, H.M., 2021, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, J. Pajar, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indeph Publishing, Bandar Lampung.

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832).

C. JURNAL

Adonara, Firman Floranta, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, Juni 2015.

Djelantik, Sukawarsini, “Korupsi Kemiskinan dan Masalah di Negara Berkembang”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 1, Februari 2008.

Imanuel, Briean, Ruddy Watulingas, dan Harly Stanly, “Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 2, No. 2, Maret 2018.

Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi, dan Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan

Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021.

Parapat, Yonta do, dkk, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.

Pattiwael, Joey Josua Pamungkas dan Syarifah Amalia Bin Tahir, “Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara”, *Jurnal Universitas Gorontalo*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2021.

Sambuari, Fista Prilia, “Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, April 2013.

Satory, Agus, Hotma Pardomuan Sibuea, “Problematika Kedudukan dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan” *Pakuan Law Review*, Vol. 06, No. 01, Januari 2020.

Syauki, Ahmad, dkk, “Corruption: Not a Taboo for Indonesians”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 7, No. 1, Mei 2022.

Tohari, Mohamad, “Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik”, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, Februari 2022.

D. PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Suyatno, Hendrikus, *Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yohanes, Chrisnayanto, *Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan Kasus Korupsi*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

E. INTERNET

Aida Mardatillah, Hukum Online, “Dua Profesor Ini Sebut Perma Pemidanaan Perkara Tipikor Batasi Kemandirian Hakim”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2bfe025dc90/dua-profesor-ini-sebut-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian-hakim>, diakses pada 25 Agustus 2024.